

Submitted: 30 Maret 2026

Reviewed: 20 April 2026

Accepted: 30 April 2026

Formasi Ortodoksi Kristen dalam Dinamika Konflik Teologis dan Kekuasaan Gerejawi pada Era Patristik

Sandra Dewi Kristian

Sekolah Tinggi Teologi Bina Insani Indonesia Kasih Abadi Pematang Siantar

Email Korespondensi: sandradewikristian76@gmail.com

Abstract:

This study examines the formation of Christian orthodoxy in the patristic era by treating theological conflict and ecclesiastical power as interrelated dynamics. It employs a qualitative library-research approach with historical-theological analysis of academic literature on orthodoxy, heresy, councils, episcopal authority, and imperial involvement. The findings show that orthodoxy did not emerge through a single decisive act but through a gradual process involving the interpretation of Scripture and apostolic tradition, doctrinal controversy, identity differentiation, institutional-conciliar articulation, and ecclesial reception. Conflicts involving Gnosticism, Marcionism, Arianism, pneumatological disputes, and Christological controversies sharpened doctrinal boundaries, while episcopal authority, rivalry among major sees, deposition, excommunication, and imperial intervention shaped mechanisms of public legitimacy. The study's novelty lies in the proposed Patristic Orthodoxy Formation Model, integrating normative foundations, hermeneutical contestation, identity differentiation, institutional-conciliar articulation, and reception and stabilization. The model shows that orthodoxy emerged through interaction between theological truth claims and historical processes that established ecclesial authority.

Keywords: *Christian orthodoxy; patristic era; theological conflict; ecclesiastical power.*

Abstrak:

Penelitian ini menganalisis formasi ortodoksi Kristen pada era patristik dengan menempatkan konflik teologis dan kekuasaan gerejawi sebagai dua dinamika yang saling berkelindan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan analisis historis-teologis terhadap literatur akademik mengenai ortodoksi, heresi, konsili, otoritas episkopal, dan keterlibatan kekaisaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ortodoksi tidak terbentuk melalui satu keputusan tunggal, melainkan melalui proses bertahap yang mencakup penafsiran Kitab Suci dan tradisi apostolik, kontroversi doktrinal, diferensiasi identitas, artikulasi institusional-konsiliar, serta penerimaan gerejawi. Konflik Gnostik, Marcionisme, Arianisme, kontroversi pneumatologis, dan Kristologis memperjelas batas doktrinal, sementara otoritas uskup, rivalitas takhta gerejawi, deposisi, ekskomunikasi, dan intervensi kekaisaran membentuk mekanisme legitimasi publiknya. Kebaruan penelitian terletak pada Model Formasi Ortodoksi Patristik yang mengintegrasikan fondasi normatif, kontestasi hermeneutis, diferensiasi identitas, artikulasi institusional-konsiliar, serta resepsi dan stabilisasi sebagai proses dinamis. Model ini menegaskan bahwa ortodoksi dibentuk melalui interaksi antara klaim kebenaran teologis dan proses historis yang mengukuhkan otoritas publiknya dalam kehidupan gereja.

Kata Kunci: ortodoksi kristen; era patristik; konflik teologis; kekuasaan gereja.

PENDAHULUAN

Peringatan 1700 tahun Konsili Nikea pada 2025 kembali menarik perhatian akademik terhadap proses terbentuknya ortodoksi Kristen. Forum khusus yang diterbitkan *Church History* memperlihatkan bahwa Nikea tidak hanya penting sebagai peristiwa perumusan kredo, tetapi juga sebagai pintu masuk untuk menilai kembali hubungan antara doktrin, otoritas gerejawi, identitas komunitas, dan kekuasaan politik dalam sejarah Kekristenan.¹ Relevansi tersebut penting sebab ortodoksi pada era patristik tidak lahir dalam ruang teologis yang steril. Perdebatan tentang Kristologi dan Tritunggal berlangsung bersamaan dengan persaingan antarkelompok Kristen, penguatan kedudukan para uskup, penyelenggaraan konsili, serta keterlibatan kaisar dalam urusan gerejawi. Dengan demikian, pertanyaan mengenai bagaimana ortodoksi terbentuk tidak dapat dijawab hanya dengan menelusuri perkembangan rumusan doktrin, tetapi juga harus memperhatikan struktur kekuasaan yang memungkinkan suatu rumusan diterima sebagai norma gereja.

Kajian modern mengenai ortodoksi dan heresi telah mengalami perubahan besar. Jorgensen menunjukkan bahwa model historiografi lama cenderung memahami ortodoksi sebagai bentuk Kekristenan yang sejak awal telah mapan, sedangkan heresi dianggap sebagai penyimpangan yang muncul kemudian. Kajian sesudah Walter Bauer mengubah gambaran tersebut dengan menempatkan ortodoksi dan heresi sebagai kategori yang juga terbentuk melalui proses historis, sosial, dan retorik dalam perjuangan menentukan identitas Kristen.² Pergeseran ini tidak berarti bahwa kebenaran doktrinal dapat direduksi menjadi hasil kompetisi sosial. Sebaliknya, perubahan historiografis tersebut mendorong penelitian untuk membedakan antara isi keyakinan teologis dan mekanisme historis yang membuat suatu formulasi memperoleh kedudukan normatif. Persoalan penelitian karena itu terletak pada pertemuan antara argumentasi teologis dan proses institusional yang menetapkan batas antara ajaran yang diterima dan ajaran yang ditolak.

Konsili Nikea pada 325 Masehi menjadi contoh paling jelas mengenai pertemuan tersebut. Konflik yang dipicu oleh kontroversi Arius berkembang melampaui persoalan penafsiran mengenai hubungan Bapa dan Anak. Perselisihan itu melibatkan jaringan uskup, otoritas lokal, surat menyurat, sinode, serta perhatian kekaisaran terhadap kesatuan gereja. Rukuni dan Oliver menunjukkan bahwa pembentukan ortodoksi Nikea sebaiknya tidak dijelaskan hanya melalui dominasi Konstantinus. Mereka menempatkan intervensi kekaisaran bersama perkembangan kekuasaan episkopal sebagai faktor yang saling berinteraksi dalam pembentukan Kekristenan abad keempat.³ Bahkan penelitian Chandler mengenai Kristologi

¹ Sara Parvis, "The Reception of Nicaea and Homoousios to 360," in *The Cambridge Companion to the Council of Nicaea*, ed. Young Richard Kim (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), 225–255, <https://doi.org/10.1017/9781108613200.011>.

² Walter Bauer and Frederick William Danker, *A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature* (Chicago: The University of Chicago, 2001), 98.

³ Rugare Rukuni and Erna Oliver, "Nicaea as Political Orthodoxy: Imperial Christianity versus Episcopal Politics," *HTS Theologisches Studien / Theological Studies* 75, no. 4 (2019): 5313, <https://doi.org/10.4102/hts.v75i4.5313>.

Konstantinus memperumit anggapan bahwa kaisar hanya bertindak sebagai pembawa teologi Nikea. Analisisnya menunjukkan bahwa pandangan Kristologis Konstantinus sendiri tidak mudah disamakan begitu saja dengan rumusan yang kemudian dipahami sebagai ortodoksi Nikea.⁴

Lebih jauh, keputusan konsili tidak serta merta mengakhiri konflik. Parvis menunjukkan bahwa sesudah 325 Masehi beberapa keputusan penting Nikea mengalami pembalikan dalam praktik gerejawi dan politik. Arius dipanggil kembali, sejumlah lawannya mengalami tekanan, dan istilah *homoousios* tetap diperdebatkan selama beberapa dasawarsa. Baru melalui proses penerimaan, argumentasi teologis, jaringan para uskup, dan perubahan politik, rumusan Nikea memperoleh penerimaan yang semakin luas.⁵ Fakta tersebut menunjukkan bahwa ortodoksi bukan hanya hasil dari satu keputusan formal. Konsili memang mempunyai peranan menentukan, tetapi otoritas suatu rumusan juga bergantung pada bagaimana rumusan tersebut dipertahankan, ditafsirkan, diajarkan, dan diterima di dalam kehidupan gereja.

Persoalan menjadi semakin kompleks ketika kekuasaan kekaisaran berkembang menjadi bagian dari mekanisme pengaturan konflik gerejawi. Andriollo menunjukkan bahwa keterlibatan kaisar dalam konsili tidak mempunyai satu bentuk yang seragam. Intervensi dapat berlangsung melalui kehadiran langsung, pengaturan prosedur, penyebaran dokumen, dan dukungan terhadap keputusan konsili. Pada Konsili Kalsedon, misalnya, keterlibatan Kaisar Marcian ikut memengaruhi bagaimana tindakan konsili direkam dan diterima.⁶ Niccolai juga menunjukkan bahwa sejak masa Konstantinus, pengelolaan ortodoksi semakin terkait dengan pemerintahan kekaisaran dan kerangka hukum Romawi. Pada saat yang sama, para uskup memperoleh ruang politik yang semakin besar sebagai pemimpin masyarakat dan mediator antara komunitas Kristen dengan kekuasaan pusat.⁷

Konsekuensi hubungan tersebut terlihat lebih jelas ketika kategori heresi memperoleh implikasi hukum. Humfress memperlihatkan bahwa diskursus heresiologis dan hukum kekaisaran tidak selalu identik, tetapi keduanya secara bertahap bertemu dalam pembentukan rezim kekuasaan gerejawi pada akhir zaman Romawi. Heretik bukan lagi sekadar lawan dalam perdebatan teologis, tetapi dapat menjadi subjek tindakan hukum, pembatasan, dan pengucilan institusional.⁸ Pada abad kelima, konflik Kristologis juga menunjukkan keterlibatan elite sipil yang semakin kompleks. Whelan melalui kasus Irenaeus memperlihatkan bagaimana pejabat istana, jaringan patronase, dan faksi episkopal ikut berperan dalam kontroversi Nestorius.

⁴ Kegan A Chandler, "Deuteros Theos: Constantine's Christology at Nicaea," *Journal of Early Christian History* 11, no. 3 (2021): 1–17, <https://doi.org/10.1080/2222582X.2020.1845571>.

⁵ Parvis, "The Reception of Nicaea and Homoousios to 360."

⁶ Luisa Andriollo, "The Emperor at the Council. Imperial Interventions in Late Antique Church Councils in Literary Sources and Documentary Records," *Millennium* 18, no. 1 (2021): 175–202, <https://doi.org/10.1515/mill-2021-0006>.

⁷ Lea Niccolai, "Introduction," in *Christianity, Philosophy, and Roman Power: Constantine, Julian, and the Bishops on Exegesis and Empire* (Cambridge: Cambridge University Press, 2023), 1–36, <https://doi.org/10.1017/9781009299312.002>.

⁸ Caroline Humfress, "'Cherchez La Femme!' Heresy and Law in Late Antiquity," *Studies in Church History* 56 (2020): 36–59, <https://doi.org/10.1017/stc.2019.3>.

Relasi negara dan gereja pada masa tersebut bukan hubungan satu arah, melainkan jaringan ketergantungan, negosiasi, dan konflik.⁹

Penelitian terdahulu dengan demikian telah membahas banyak unsur penting. Jorgensen memetakan perkembangan historiografi ortodoksi dan heresi. Rukuni dan Oliver menyoroti hubungan politik kekaisaran dengan kekuasaan episkopal. Parvis mengkaji proses penerimaan Nikea. Andriollo menjelaskan bentuk intervensi kaisar dalam konsili. Humfress membahas pertemuan antara heresiologi dan hukum, sedangkan Whelan memperlihatkan jaringan elite politik dalam konflik Kristologis. Namun, dalam literatur yang ditelaah masih terdapat *research gap* berupa kebutuhan untuk membaca unsur-unsur tersebut secara terpadu sebagai proses formasi ortodoksi. Persoalannya bukan sekadar siapa memenangkan konflik teologis, melainkan bagaimana argumentasi doktrinal, keputusan konsiliar, otoritas para uskup, penerimaan komunitas, dan kekuasaan politik bekerja secara bersama dalam pembentukan batas iman Kristen.

Novelty penelitian ini terletak pada konstruksi formasi ortodoksi sebagai proses berlapis yang mempertemukan konflik teologis dengan kekuasaan gerejawi tanpa mereduksi ortodoksi menjadi produk politik semata. Ortodoksi dipahami sebagai hasil interaksi antara artikulasi teologis, mekanisme konsiliar, otoritas episkopal, pengelolaan konflik, intervensi kekaisaran, dan penerimaan gerejawi. Pendekatan ini memungkinkan penelitian membedakan antara klaim kebenaran iman dan proses historis yang membentuk otoritas publiknya. Berdasarkan persoalan tersebut, pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana ortodoksi Kristen terbentuk melalui dinamika konflik teologis dan kekuasaan gerejawi pada era patristik? Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara kontroversi teologis, struktur otoritas gerejawi, konsili, dan keterlibatan kekaisaran untuk menjelaskan proses historis yang membentuk ortodoksi Kristen pada era patristik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis historis-teologis. Studi kepustakaan dipilih karena penelitian berfokus pada rekonstruksi konsep dan relasi antara konflik doktrinal, otoritas gerejawi, konsili, serta keterlibatan kekaisaran berdasarkan sumber akademik yang relevan. Snyder menegaskan bahwa kajian literatur dapat digunakan sebagai metode penelitian untuk mengintegrasikan temuan, mengidentifikasi pola, menemukan kesenjangan pengetahuan, dan membangun kerangka konseptual baru.¹⁰ Data penelitian berupa artikel jurnal, monograf, dan bab buku akademik yang membahas ortodoksi, heresi, perkembangan episkopal, kontroversi Trinitarian dan Kristologis,

⁹ Robin Whelan, "Count Irenaeus and the Nestorian Controversy," *The Journal of Ecclesiastical History* 76, no. 2 (2025): 245–263, <https://doi.org/10.1017/S0022046924001544>.

¹⁰ Hannah Snyder, "Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines," *Journal of Business Research* 104, no. 1 (November 2019): 333–339, <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>.

konsili, serta relasi gereja dan kekaisaran. Analisis dilakukan melalui empat tahap. Pertama, literatur dipetakan berdasarkan tema dan persoalan historis-teologis yang relevan. Kedua, sumber diseleksi berdasarkan relevansi terhadap pertanyaan penelitian, kredibilitas akademik, keterlacakan bibliografis, dan kontribusinya terhadap argumentasi. Ketiga, data dianalisis dengan memperhatikan konteks historis, aktor, istilah teologis, keputusan konsili, perubahan struktur otoritas, dan proses penerimaan gerejawi. Keempat, temuan dibandingkan dan disintesis secara tematik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ortodoksi sebagai Proses Formasi Teologis dan Institusional

Ortodoksi Kristen pada era patristik tidak dapat dipahami hanya sebagai seperangkat doktrin yang sejak awal telah memiliki bentuk final dan kemudian diwariskan secara statis kepada generasi berikutnya. Ortodoksi terbentuk melalui proses historis ketika komunitas Kristen berusaha mengenali, mempertahankan, dan merumuskan ajaran yang dianggap memiliki kesinambungan dengan kesaksian apostolik. Proses tersebut berlangsung bersamaan dengan perkembangan tradisi tertulis, pembentukan kanon, struktur kepemimpinan gereja, dan praktik kehidupan komunitas. Pembentukan kanon Perjanjian Baru sendiri menunjukkan bahwa penerimaan sebuah tulisan berkaitan dengan hubungan terhadap tradisi apostolik, kesesuaiannya dengan keyakinan mendasar komunitas Kristen, serta penerimaannya secara luas dalam gereja.¹¹ McDonald juga menunjukkan bahwa penggunaan kitab-kitab tertentu dalam kehidupan dan praktik liturgis komunitas turut berkaitan dengan proses penerimaan kanonik yang berlangsung secara bertahap.¹²

Dalam proses tersebut, Kitab Suci dan tradisi apostolik tidak berfungsi sebagai dua realitas yang sepenuhnya terpisah. Komunitas Kristen membaca teks-teks yang kemudian menjadi kanonik di dalam horizon iman yang diwariskan melalui pewartaan apostolik. Hubungan ini terlihat melalui penggunaan *regula fidei* sebagai kerangka untuk menilai interpretasi terhadap Kitab Suci. Sandnes menunjukkan bahwa Irenaeus dan Tertullianus menggunakan *rule of faith* dalam konteks perdebatan dengan kelompok-kelompok yang menawarkan konstruksi alternatif terhadap narasi Kristen.¹³ Dengan demikian, *regula fidei* tidak sekadar berfungsi sebagai katalog proposisi doktrinal, tetapi sebagai kerangka hermeneutis yang menjaga keterhubungan antara penciptaan, karya Kristus, keselamatan, dan pengharapan eskatologis.

¹¹ Donald Senior, *The New Testament: A Guide* (New York: Oxford University Press, 2022), <https://doi.org/10.1093/oso/9780197530832.001.0001>.

¹² Lee Martin McDonald, "The Emergence of Biblical Canons in Orthodox Christianity," in *The Oxford Handbook of the Bible in Orthodox Christianity*, ed. Eugen J Pentiuc (New York: Oxford University Press, 2022), 149–163, <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190948658.013.12>.

¹³ Karl Olav Sandnes, "The Rule of Faith: Getting the Jigsaw Puzzle Right," *Studia Theologica - Nordic Journal of Theology* 77, no. 1 (2023): 22–39, <https://doi.org/10.1080/0039338X.2021.2019829>.

Proses formasi tersebut kemudian memperoleh artikulasi yang semakin eksplisit melalui pengakuan iman dan kredo. Formulasi kredo berfungsi bukan hanya untuk menyatakan kepercayaan komunitas, tetapi juga untuk memberikan batas terhadap interpretasi yang dianggap tidak sejalan dengan iman gereja. Edwards memperlihatkan bahwa perkembangan kredo di sekitar Konsili Nicea berkaitan erat dengan pembacaan Kitab Suci dan kebutuhan untuk merumuskan terminologi yang lebih tepat dalam menghadapi kontroversi teologis.¹⁴ Pada saat yang sama, perkembangan ortodoksi juga tidak dapat dilepaskan dari pembentukan struktur otoritas gerejawi. Studi Bobertz mengenai Cyprianus dari Kartago menunjukkan bahwa meningkatnya otoritas episkopal berhubungan dengan proses institusionalisasi gereja dan pembentukan pola kepemimpinan yang semakin jelas.¹⁵

Selain teks, kredo, dan otoritas, praktik liturgis menjadi ruang penting tempat keyakinan gereja diwujudkan dan diwariskan. Baptisan, Ekaristi, perayaan hari Tuhan, dan berbagai bentuk inisiasi Kristen membentuk pola kehidupan bersama yang menanamkan identitas teologis komunitas secara berulang. Buchinger menunjukkan bahwa praktik liturgis Kekristenan awal berkembang secara kompleks dan mengalami proses pembentukan serta kodifikasi yang berlangsung bertahap.¹⁶ Oleh karena itu, formasi ortodoksi pada era patristik perlu dipahami sebagai proses teologis sekaligus eklesiologis. Ortodoksi berkembang melalui interaksi antara Kitab Suci, tradisi apostolik, *regula fidei*, pengakuan iman, otoritas episkopal, dan praktik liturgis yang secara bersama-sama membentuk batas identitas serta kesinambungan iman gereja.

Konflik Teologis sebagai Katalisator Pembentukan Ortodoksi

Konflik teologis pada era patristik tidak hanya menciptakan fragmentasi internal, tetapi juga berfungsi sebagai katalisator bagi gereja untuk memperjelas batas-batas keyakinannya. Dinamika ini terlihat sejak kontroversi dengan berbagai kelompok yang secara umum dikategorikan sebagai Gnostik dan dalam perdebatan dengan Marcion pada abad kedua. Persoalan yang muncul tidak terbatas pada identitas Kristus, tetapi menyentuh hubungan antara Allah pencipta dengan Allah yang diberitakan dalam Injil, kontinuitas Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, serta legitimasi tulisan-tulisan yang memiliki otoritas bagi komunitas Kristen. Litwa menunjukkan bahwa konstruksi teologis Marcion bahkan perlu dipahami secara lebih hati-hati daripada sekadar menyebutnya sebagai sistem dua Allah. Marcion cenderung membedakan Allah yang benar dari pencipta dengan cara merendahkan status teologis

¹⁴ Mark J Edwards, "The Creed," in *The Cambridge Companion to the Council of Nicaea*, ed. Young Richard Kim (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), 135–157, <https://doi.org/10.1017/9781108613200.007>.

¹⁵ Charles A Bobertz, *Cyprian of Carthage: Priest and Patron*, *Studia Patristica Supplements* (Leuven: Peeters Publishers, 2023), <https://doi.org/10.2307/jj.13524425>.

¹⁶ Harald Buchinger, "Liturgy in Early Christianity," in *The Cambridge Companion to Christian Liturgy*, ed. Joris Geldhof (Cambridge: Cambridge University Press, 2025), 7–23, <https://doi.org/10.1017/9781009186650.003>.

pencipta dibandingkan Allah yang dinyatakan melalui Kristus.¹⁷ Situasi seperti ini memaksa gereja untuk mempertahankan kesinambungan antara penciptaan dan keselamatan sekaligus menegaskan bahwa Allah yang menciptakan dunia adalah Allah yang sama yang menyatakan diri dalam Kristus. Dalam konteks inilah kontribusi Irenaeus menjadi penting. Melalui polemiknya terhadap kaum Valentinian, Marcion, dan berbagai kelompok lain, Irenaeus tidak hanya membangun argumentasi teologis, tetapi juga menghubungkan ortodoksi dengan kontinuitas ajaran apostolik yang dipelihara dalam gereja. Chang menunjukkan bahwa eklesiologi Irenaeus menjadi instrumen penting dalam membedakan ajaran apostolik dari konstruksi alternatif yang dipandangnya menyimpang.¹⁸ Dengan demikian, kontroversi tersebut justru memperjelas hubungan antara Kitab Suci, tradisi apostolik, dan identitas gerejawi sebagai parameter penilaian ortodoksi.

Pola serupa menjadi semakin jelas dalam kontroversi Trinitarian abad keempat. Perdebatan yang berkaitan dengan Arius pada dasarnya berpusat pada status ontologis Anak dalam relasinya dengan Bapa. Apabila Anak dipahami sebagai makhluk yang memiliki permulaan, maka keilahian-Nya tidak berada dalam kategori yang sama dengan Bapa. Namun, kompleksitas kontroversi tersebut tidak dapat direduksi menjadi pertentangan sederhana antara Arius dan Athanasius. Him Ip memperlihatkan bahwa sebagian bahasa dan kategori yang kemudian diasosiasikan dengan "Arianisme" memiliki sejarah konseptual yang lebih panjang dan bahwa pembacaan terhadap Origen turut menjadi bagian dari perdebatan mengenai relasi Bapa dan Anak.¹⁹ Konsili Nicea tahun 325 kemudian memperkenalkan formulasi *homoousios* untuk menyatakan bahwa Anak "sehakikat" dengan Bapa. Istilah tersebut bukan terminologi eksplisit dalam Kitab Suci, tetapi menjadi instrumen konseptual untuk mencegah pembacaan yang dapat menempatkan Anak dalam kategori ciptaan. Kinzig menunjukkan bahwa penggunaan *homoousios* berkembang dalam konteks kebutuhan untuk menghasilkan formulasi yang tidak mudah ditafsirkan kembali dalam pengertian subordinasionis.²⁰ Dengan demikian, konflik Arian tidak hanya menghasilkan penolakan terhadap sebuah posisi teologis, tetapi juga memaksa gereja mengembangkan terminologi yang lebih presisi untuk menjelaskan hubungan antara Bapa dan Anak.

Klarifikasi terhadap keilahian Anak kemudian membuka persoalan lebih lanjut mengenai status Roh Kudus. Kontroversi pneumatologis memperlihatkan bahwa formasi ortodoksi berlangsung secara bertahap. Pengakuan terhadap keilahian Anak belum otomatis menghasilkan formulasi yang sama jelasnya mengenai Roh Kudus. Kelompok-kelompok yang kemudian disebut Pneumatomachian mempertanyakan apakah Roh Kudus harus ditempatkan sepenuhnya dalam identitas ilahi atau berada

¹⁷ M David Litwa, "Did Marcion Call the Creator 'God'?", *The Journal of Theological Studies* 72, no. 1 (2021): 231–246, <https://doi.org/10.1093/jts/flab010>.

¹⁸ Geoffrey Chang, "The Pillar and Ground of Truth: Irenaeus' Use of Ecclesiology Against the Heresies," *Perichoresis* 21, no. 2 (2023): 4–20, <https://doi.org/10.2478/perc-2023-0013>.

¹⁹ Pui Him Ip, "'Arianism' Ante Litteram in Origen's Peri Archon 4.4.1," *The Journal of Theological Studies* 72, no. 1 (2021): 247–278, <https://doi.org/10.1093/jts/flaa147>.

²⁰ Wolfram Kinzig, "The Creed of Nicaea: Old Questions, New Answers," *The Ecumenical Review* 75, no. 2 (2023): 215–234, <https://doi.org/10.1111/erev.12782>.

dalam kategori yang lebih rendah. Dalam situasi ini, para Bapa Kapadokia memberikan kontribusi penting. Basil dari Kaisarea secara khusus membangun argumentasi mengenai kesetaraan kehormatan Roh Kudus dengan Bapa dan Anak sekalipun ia berhati-hati menggunakan terminologi *homoousios* secara langsung bagi Roh. Whitty menunjukkan bahwa *On the Holy Spirit* juga lahir dari situasi konflik gerejawi konkret dan perlu dibaca sebagai upaya apologetis sekaligus rekonsiliatif di tengah pertikaian yang berhubungan dengan Eustathius dari Sebaste.²¹ Perdebatan ini memperlihatkan bahwa terminologi Trinitarian berkembang bukan melalui spekulasi abstrak semata, tetapi melalui kebutuhan untuk menjelaskan praktik ibadah, tradisi gereja, dan pengalaman keselamatan secara koheren. Perkembangan tersebut mencapai konsolidasi penting pada Konsili Konstantinopel tahun 381 ketika pengakuan tentang Roh Kudus diperluas dalam kerangka Trinitarian yang lebih komprehensif.

Konflik Kristologis abad kelima memperlihatkan tahap berikutnya dari proses tersebut. Jika kontroversi sebelumnya berfokus pada keilahian Anak, persoalan selanjutnya adalah bagaimana keilahian dan kemanusiaan itu bersatu dalam Kristus. Perdebatan antara Nestorius dan Cyril dari Alexandria memperlihatkan bahwa penggunaan istilah *Theotokos* sesungguhnya berkaitan dengan persoalan yang lebih mendasar mengenai kesatuan subjek Kristus. Kim menunjukkan bahwa perbedaan keduanya tidak dapat direduksi hanya pada persoalan gelar Maria, karena di baliknya terdapat perbedaan konseptual mengenai *physis*, *hypostasis*, dan cara memahami persatuan ilahi dan manusiawi dalam Kristus.²² Ketegangan tersebut berlanjut setelah Efesus tahun 431 dan memperoleh bentuk baru ketika posisi Eutyches dipandang terlalu menekankan kesatuan sehingga berpotensi mengaburkan integritas kemanusiaan Kristus. Konsili Chalcedon tahun 451 kemudian merumuskan bahwa Kristus dikenali dalam dua natur tanpa percampuran, perubahan, pembagian, atau pemisahan. Perdebatan sesudah Chalcedon menunjukkan bahwa istilah *physis*, *hypostasis*, dan *prosopon* tetap memerlukan penafsiran yang cermat. Mateiescu memperlihatkan bahwa bahkan perbedaan antara tradisi Chalcedonian dan non-Chalcedonian tidak semata-mata berkaitan dengan bahasa, tetapi juga menyangkut cara konseptualisasi mengenai realitas kedua natur Kristus.²³ Dengan demikian, konflik Kristologis memperlihatkan bahwa ortodoksi tidak lahir dari ketiadaan perbedaan, melainkan melalui proses panjang ketika perbedaan tersebut mendorong gereja mengembangkan bahasa doktrinal yang semakin presisi. Dalam keseluruhan proses ini, konflik berfungsi bukan sekadar sebagai ancaman terhadap kesatuan gereja,

²¹ John Joseph Whitty, "Reading Basil of Caesarea's *On the Holy Spirit* as Apology: Reassessing the Influence of Eustathius of Sebaste on the Treatise," *Vigiliae Christianae* 77, no. 4 (2023): 353–374, <https://doi.org/10.1163/15700720-bja10056>.

²² Yong Jun Kim, "A Reformed Assessment on the Theological Differences between Cyril of Alexandria and Nestorius," *Korea Reformed Journal* 65 (2023): 55–78, <https://doi.org/10.57228/KRJ.65.2>.

²³ Sebastian Mateiescu, "'In Contemplation Only': Revisiting the Debate between the Chalcedonians and Anti-Chalcedonians on the Reality of the Natures of Christ," *Modern Theology* 39, no. 3 (2023): 490–507, <https://doi.org/10.1111/moth.12871>.

tetapi juga sebagai mekanisme historis yang memperjelas batas, struktur, dan koherensi ortodoksi Kristen.

Kekuasaan Gerejawi dan Otoritas dalam Penentuan Ortodoksi

Perkembangan ortodoksi pada era patristik tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya otoritas episkopal dalam kehidupan gereja. Pada masa Kekristenan awal, otoritas tidak secara eksklusif berada pada uskup karena komunitas juga mengenal otoritas para guru, nabi, asket, dan figur karismatis. Leppin menunjukkan bahwa meningkatnya kedudukan uskup merupakan hasil perkembangan historis ketika otoritas berdasarkan jabatan semakin memperoleh posisi dominan dalam komunitas Kristen.²⁴ Proses tersebut juga mencakup perluasan fungsi intelektual dan liturgis jabatan episkopal. Stewart mencatat bahwa perkembangan jabatan gerejawi secara bertahap menempatkan uskup dan presbiter bukan hanya sebagai pemimpin komunitas, tetapi juga sebagai pemegang fungsi pengajaran dan kepemimpinan liturgis.²⁵ Dengan demikian, kemampuan untuk menentukan ajaran yang sah semakin terhubung dengan legitimasi jabatan gerejawi. Suksesi apostolik kemudian menyediakan kerangka historis-teologis untuk menghubungkan otoritas uskup dengan kontinuitas gereja apostolik.

Namun, suksesi apostolik juga dapat berfungsi sebagai bahasa legitimasi dalam persaingan antarpusat gerejawi. Livneh menunjukkan bahwa tradisi mengenai kesinambungan gereja Yerusalem dari Yakobus dan para pemimpin apostolik dapat digunakan untuk memperkuat klaim kedudukan gereja tersebut di Palestina.²⁶ Di Roma, hubungan dengan Petrus berkembang menjadi sumber legitimasi yang semakin penting bagi klaim otoritas uskup Roma. Kajian Gilski dan Wasek terhadap dokumen konsili menunjukkan bahwa figur Petrus digunakan dalam berbagai konteks sebagai otoritas doktrinal dan, dalam keadaan tertentu, juga sebagai dasar bagi klaim yurisdiksional.²⁷ Karena itu, konsep apostolisitas tidak semata-mata menjadi kategori teologis, tetapi juga menjadi sumber modal simbolik dalam negosiasi kedudukan gerejawi.

Persaingan tersebut semakin kompleks ketika Roma, Alexandria, Antiokhia, Konstantinopel, dan Yerusalem berkembang sebagai pusat-pusat kekuasaan gerejawi. Kedudukan mereka tidak hanya ditentukan oleh warisan apostolik, tetapi juga oleh posisi politik kota, jaringan episkopal, hubungan dengan istana kekaisaran, dan kemampuan memperoleh dukungan dalam konsili. Menze memperlihatkan bahwa

²⁴ Hartmut Leppin, "Christian Authorities," in *The Early Christians: From the Beginnings to Constantine*, trans. Kathrin Luddecke (Cambridge: Cambridge University Press, 2023), 116–222, <https://doi.org/10.1017/9781009043618.005>.

²⁵ Alistair C Stewart, "Office, and Appointment to Office, in Early Christian Circles," in *The Cambridge History of Ancient Christianity*, ed. Bruce W Longenecker and David E Wilhite (Cambridge: Cambridge University Press, 2023), 536–558, <https://doi.org/10.1017/9781108620420.029>.

²⁶ Yonatan Livneh, "Historical Ruptures in Eusebius' History of the Jerusalem Church," *Zeitschrift Für Antikes Christentum / Journal of Ancient Christianity* 27, no. 3 (2023): 449–483, <https://doi.org/10.1515/zac-2023-0026>.

²⁷ Marek Gilski and Damian Wasek, "The Authority of Peter the Apostle in the Acts of the First Millennium Councils," *Vox Patrum* 91 (2024): 213–234, <https://doi.org/10.31743/vp.17187>.

keseimbangan antara Alexandria dan Antiokhia pada pertengahan abad kelima sangat rapuh, sementara perselisihan Kristologis berkaitan erat dengan perebutan dukungan di antara takhta-takhta episkopal.²⁸ Sementara itu, munculnya Konstantinopel sebagai pusat kekuasaan baru menciptakan persoalan tersendiri bagi Roma. Perdebatan mengenai Kanon 28 Konsili Chalcedon memperlihatkan bagaimana peningkatan prerogatif Konstantinopel berhadapan dengan klaim otoritas Roma. Kooijman menunjukkan bahwa bahkan korespondensi Kaisar Marcian dan Leo I dapat digunakan secara berbeda untuk mendukung narasi otoritas Roma maupun Konstantinopel.²⁹ Dengan demikian, hierarki gerejawi bukan struktur yang sepenuhnya mapan, melainkan terus dinegosiasikan.

Kontroversi doktrinal juga memperlihatkan bahwa otoritas gerejawi bekerja melalui mekanisme disipliner. Ekskomunikasi, deposisi, dan rehabilitasi tidak sekadar merupakan tindakan administratif, tetapi dapat menentukan siapa yang masih memiliki legitimasi untuk mengajar dan memimpin gereja. Dalam konflik Athanasius, misalnya, McCashen menunjukkan bahwa ekskomunikasi dapat menjadi bagian dari negosiasi yang menggabungkan prosedur gerejawi, persoalan doktrinal, dan upaya mencapai perdamaian institusional.³⁰ Situasi yang lebih kompleks muncul dalam kasus Nestorius, ketika konflik teologis berjaln dengan mobilisasi jaringan gerejawi dan akses kepada istana kekaisaran. Slootjes memperlihatkan bagaimana para aktor dalam kontroversi Efesus menggunakan surat, utusan, patronase, dan relasi dengan lingkungan kekaisaran untuk memperoleh dukungan bagi posisi mereka.³¹

Kasus Dioscorus dari Alexandria semakin menunjukkan bahwa deposisi tidak selalu identik dengan keputusan teologis yang sederhana. Menze menegaskan bahwa pada Chalcedon tahun 451 Dioscorus secara formal dideposisi, sementara proses yang menghasilkan deposisi tersebut terkait pula dengan pertanggungjawaban atas Konsili Efesus tahun 449 dan perubahan konstelasi kekuasaan setelah kematian Theodosius II.³² Karena itu, mekanisme disipliner gereja berfungsi sebagai salah satu instrumen untuk menetapkan batas ortodoksi sekaligus mengatur distribusi otoritas. Formasi ortodoksi pada era patristik dengan demikian berlangsung melalui interaksi antara argumentasi teologis dan struktur kekuasaan institusional. Siapa yang berhak

²⁸ Volker L Menze, "The Emperor's Henchman: Dioscorus and the 'Robber-Council'," in *Patriarch Dioscorus of Alexandria: The Last Pharaoh and Ecclesiastical Politics in the Later Roman Empire* (Oxford: Oxford University Press, 2023), 89–150, <https://doi.org/10.1093/oso/9780192871336.003.0004>.

²⁹ Marijke Kooijman, "Narratives of Authority around Chalcedon's Canon 28: The Emperor Marcian, Bishop Leo I, and the Functions of Late-Antique Imperial Letters in Ecclesiastical Letter Collections," *Journal of Early Christian Studies* 32, no. 4 (2024): 519–551, <https://doi.org/10.1353/earl.2024.a947486>.

³⁰ Grayden McCashen, "Liberius on Athanasius at Arles, Milan, and in Constantius' Court," *The Journal of Theological Studies* 74, no. 2 (2023): 673–705, <https://doi.org/10.1093/jts/flad034>.

³¹ Daniëlle Slootjes, "Dynamics of Power: The Nestorian Controversy, the Council of Ephesus of 431, and the Eastern Imperial Court," in *The Roman Imperial Court in the Principate and Late Antiquity*, ed. Caillan Davenport and Meaghan McEvoy (Oxford: Oxford University Press, 2023), 240–261, <https://doi.org/10.1093/oso/9780192865236.003.0012>.

³² Volker L Menze, "The Black Swan of Chalcedon and Dioscorus' Deposition," in *Patriarch Dioscorus of Alexandria: The Last Pharaoh and Ecclesiastical Politics in the Later Roman Empire* (Oxford: Oxford University Press, 2023), 151–185, <https://doi.org/10.1093/oso/9780192871336.003.0005>.

mengajar, memimpin konsili, mempertahankan jabatan, atau mencabut legitimasi seorang uskup menjadi bagian integral dari proses ketika gereja mendefinisikan ajaran yang diterima sebagai ortodoks.

Rekonstruksi Formasi Ortodoksi Kristen pada Era Patristik

berdasarkan dinamika konflik teologis dan perkembangan otoritas gerejawi, penelitian ini mengusulkan Model Formasi Ortodoksi Patristik sebagai kerangka untuk menjelaskan bagaimana ortodoksi Kristen memperoleh bentuk yang semakin stabil pada era patristik. Model ini berangkat dari asumsi bahwa ortodoksi tidak muncul melalui satu keputusan tunggal, melainkan terbentuk melalui proses historis yang melibatkan sumber iman, kompetisi interpretasi, pembentukan batas identitas, artikulasi institusional, dan penerimaan gerejawi. Pemahaman demikian menghindari dua reduksi sekaligus, yakni melihat perkembangan doktrin semata-mata sebagai deduksi teologis yang tidak dipengaruhi sejarah atau, sebaliknya, memandang ortodoksi hanya sebagai hasil kemenangan kelompok yang memiliki kekuasaan lebih besar. Birch menegaskan bahwa perkembangan doktrin perlu memperhitungkan secara bersamaan historisitas formulasi doktrinal dan aktivitas rasional yang menyertainya.³³ McGrath juga menggambarkan Kekristenan awal sebagai semacam laboratorium teologis tempat berbagai formulasi diuji berdasarkan kemampuannya memberikan penjelasan yang koheren terhadap warisan apostolik dan praktik gereja.³⁴

Tahap pertama dalam model ini adalah fondasi normatif, yaitu kesaksian Kitab Suci dan tradisi apostolik yang menyediakan sumber bagi konstruksi teologis. Fondasi tersebut memasuki tahap kedua, yakni kontestasi hermeneutis, ketika komunitas-komunitas Kristen menghasilkan interpretasi yang berbeda terhadap Allah, Kristus, keselamatan, gereja, dan otoritas teks. Perbedaan itu kemudian memunculkan tahap ketiga berupa diferensiasi identitas, ketika batas antara ajaran yang dapat diterima dan yang dianggap menyimpang mulai dibentuk. Le Boulluec menunjukkan bahwa perkembangan wacana heresiologis berkaitan erat dengan pembentukan norma keanggotaan dan mekanisme eksklusi dalam komunitas Kristen.³⁵ Karena itu, kategori ortodoksi dan heresi tidak hanya menunjukkan perbedaan gagasan, tetapi turut membentuk identitas sosial komunitas. Temuan Oliveira dan Kok mengenai pembentukan identitas di tengah kompetisi antartradisi Kristen juga memperlihatkan

³³ Vincent Birch, "Growth of the Christian Idea: An Application of Bernard Lonergan's Thought to Discourse on Doctrinal Development," *Irish Theological Quarterly* 88, no. 2 (2023): 137–154, <https://doi.org/10.1177/00211400231160651>.

³⁴ Alistair E. McGrath, "Theorizing the Identity of Christ: On Early Christian Doctrinal Development," in *The Nature of Christian Doctrine: Its Origins, Development, and Function* (Oxford: Oxford University Press, 2024), 29–52, <https://doi.org/10.1093/oso/9780198901440.003.0002>.

³⁵ Alain Le Boulluec, "The Birth of Heresiology," in *The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries*, ed. David Lincicum and Nicholas Moore (Oxford: Oxford University Press, 2022), 13–108, <https://doi.org/10.1093/oso/9780198814092.003.0002>.

bahwa tekanan eksternal dan keberadaan kelompok tandingan dapat meningkatkan kohesi serta diferensiasi suatu komunitas.³⁶

Tahap keempat adalah artikulasi institusional dan konsiliar. Pada tahap ini, perdebatan teologis memasuki struktur gerejawi melalui uskup, sinode, kredo, kanon, dan konsili. Formulasi doktrinal memperoleh bentuk yang lebih eksplisit karena komunitas tidak hanya harus menjelaskan apa yang dipercayai, tetapi juga menetapkan bahasa yang dapat berfungsi sebagai standar bersama. Akan tetapi, keputusan konsili belum dengan sendirinya mengakhiri kontroversi. Sejarah penerimaan Chalcedon menunjukkan bahwa keputusan sebuah konsili dapat terus diperdebatkan, ditafsirkan, dan bahkan ditolak dalam berbagai wilayah gerejawi.³⁷

Karena itu, tahap kelima adalah resepsi dan stabilisasi, yakni proses ketika formulasi doktrinal diterima, diwariskan, dipraktikkan, dan memperoleh daya normatif dalam kehidupan gereja. Kelima tahap tersebut tidak selalu berlangsung secara linear, melainkan membentuk siklus yang dapat kembali menghasilkan interpretasi dan kontroversi baru. Dengan demikian, Model Formasi Ortodoksi Patristik ini menempatkan ortodoksi sebagai hasil interaksi dinamis antara teologi, hermeneutika, identitas komunitas, dan kekuasaan institusional tanpa mereduksinya kepada salah satu unsur tersebut.

KESIMPULAN

Formasi ortodoksi Kristen pada era patristik merupakan proses historis-teologis yang berlangsung melalui interaksi antara argumentasi doktrinal, otoritas gerejawi, mekanisme konsiliar, dan konfigurasi kekuasaan. Kontroversi dengan Gnostik dan Marcionisme mendorong penegasan kontinuitas antara penciptaan, keselamatan, Kitab Suci, dan tradisi apostolik. Konflik Arian, pneumatologis, dan Kristologis kemudian memperhalus terminologi yang digunakan gereja untuk menjelaskan relasi Bapa, Anak, Roh Kudus, serta kesatuan ilahi dan manusiawi dalam Kristus. Pada saat yang sama, meningkatnya otoritas episkopal, rivalitas antara Roma, Alexandria, Antiokhia, Konstantinopel, dan Yerusalem, serta praktik ekskomunikasi, deposisi, dan rehabilitasi menunjukkan bahwa penerimaan ortodoksi juga berlangsung melalui struktur institusional. Karena itu, ortodoksi tidak tepat direduksi menjadi hasil keputusan konsili atau kemenangan politik semata. Berdasarkan keseluruhan temuan, penelitian ini mengusulkan Model Formasi Ortodoksi Patristik yang terdiri atas fondasi normatif, kontestasi hermeneutis, diferensiasi identitas, artikulasi institusional-konsiliar, serta resepsi dan stabilisasi. Model ini menegaskan bahwa ortodoksi terbentuk melalui proses dinamis dan sirkular ketika keyakinan teologis dirumuskan, diperdebatkan, dilembagakan, diterima, dan terus ditafsirkan

³⁶ Nycholas Lawrence David Oliveira and Jacobus Kok, "Codex and Contest: What an Early Christian Manuscript Reveals about Social Identity Formation Amid Persecution and Competing Christianities," *Religions* 15, no. 1 (2024): 44, <https://doi.org/10.3390/rel15010044>.

³⁷ Mark DelCogliano, ed., *The Cambridge Edition of Early Christian Writings, Volume 4: Christ: Chalcedon and Beyond* (Cambridge: Cambridge University Press, 2022), <https://doi.org/10.1017/9781009057103>.

dalam kehidupan gereja. Dengan demikian, kekuasaan gerejawi berfungsi sebagai medium historis yang mengatur legitimasi, penerimaan, dan penyebaran ortodoksi tanpa menjadi satu-satunya sumber kebenaran doktrinal. Temuan ini menunjukkan bahwa sejarah ortodoksi perlu dibaca sebagai pertemuan teologi, institusi, dan resepsi gerejawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriollo, Luisa. "The Emperor at the Council. Imperial Interventions in Late Antique Church Councils in Literary Sources and Documentary Records." *Millennium* 18, no. 1 (2021): 175–202. <https://doi.org/10.1515/mill-2021-0006>.
- Bauer, Walter, and Frederick William Danker. *A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature*. Chicago: The University of Chicago, 2001.
- Birch, Vincent. "Growth of the Christian Idea: An Application of Bernard Lonergan's Thought to Discourse on Doctrinal Development." *Irish Theological Quarterly* 88, no. 2 (2023): 137–54. <https://doi.org/10.1177/00211400231160651>.
- Bobertz, Charles A. *Cyprian of Carthage: Priest and Patron*. Studia Patristica Supplements. Leuven: Peeters Publishers, 2023. <https://doi.org/10.2307/jj.13524425>.
- Boulluec, Alain Le. "The Birth of Heresiology." In *The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries*, edited by David Lincicum and Nicholas Moore, 13–108. Oxford: Oxford University Press, 2022. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198814092.003.0002>.
- Buchinger, Harald. "Liturgy in Early Christianity." In *The Cambridge Companion to Christian Liturgy*, edited by Joris Geldhof, 7–23. Cambridge: Cambridge University Press, 2025. <https://doi.org/10.1017/9781009186650.003>.
- Chandler, Kegan A. "Deuteros Theos: Constantine's Christology at Nicaea." *Journal of Early Christian History* 11, no. 3 (2021): 1–17. <https://doi.org/10.1080/2222582X.2020.1845571>.
- Chang, Geoffrey. "The Pillar and Ground of Truth: Irenaeus' Use of Ecclesiology Against the Heresies." *Perichoresis* 21, no. 2 (2023): 4–20. <https://doi.org/10.2478/perc-2023-0013>.
- DelCogliano, Mark, ed. *The Cambridge Edition of Early Christian Writings, Volume 4: Christ: Chalcedon and Beyond*. Cambridge: Cambridge University Press, 2022. <https://doi.org/10.1017/9781009057103>.
- Edwards, Mark J. "The Creed." In *The Cambridge Companion to the Council of Nicaea*, edited by Young Richard Kim, 135–57. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. <https://doi.org/10.1017/9781108613200.007>.
- Gilski, Marek, and Damian Wasek. "The Authority of Peter the Apostle in the Acts of the First Millennium Councils." *Vox Patrum* 91 (2024): 213–34. <https://doi.org/10.31743/vp.17187>.

- Humfress, Caroline. "‘Cherchez La Femme!’ Heresy and Law in Late Antiquity." *Studies in Church History* 56 (2020): 36–59. <https://doi.org/10.1017/stc.2019.3>.
- Ip, Pui Him. "‘Arianism’ Ante Litteram in Origen’s Peri Archon 4.4.1." *The Journal of Theological Studies* 72, no. 1 (2021): 247–78. <https://doi.org/10.1093/jts/flaa147>.
- Kim, Yong Jun. "A Reformed Assessment on the Theological Differences between Cyril of Alexandria and Nestorius." *Korea Reformed Journal* 65 (2023): 55–78. <https://doi.org/10.57228/KRJ.65.2>.
- Kinzig, Wolfram. "The Creed of Nicaea: Old Questions, New Answers." *The Ecumenical Review* 75, no. 2 (2023): 215–34. <https://doi.org/10.1111/erev.12782>.
- Kooijman, Marijke. "Narratives of Authority around Chalcedon’s Canon 28: The Emperor Marcian, Bishop Leo I, and the Functions of Late-Antique Imperial Letters in Ecclesiastical Letter Collections." *Journal of Early Christian Studies* 32, no. 4 (2024): 519–51. <https://doi.org/10.1353/earl.2024.a947486>.
- Leppin, Hartmut. "Christian Authorities." In *The Early Christians: From the Beginnings to Constantine*, translated by Kathrin Luddecke, 116–222. Cambridge: Cambridge University Press, 2023. <https://doi.org/10.1017/9781009043618.005>.
- Litwa, M David. "Did Marcion Call the Creator ‘God’?" *The Journal of Theological Studies* 72, no. 1 (2021): 231–46. <https://doi.org/10.1093/jts/flab010>.
- Livneh, Yonatan. "Historical Ruptures in Eusebius’ History of the Jerusalem Church." *Zeitschrift Für Antikes Christentum / Journal of Ancient Christianity* 27, no. 3 (2023): 449–83. <https://doi.org/10.1515/zac-2023-0026>.
- Mateiescu, Sebastian. "‘In Contemplation Only’: Revisiting the Debate between the Chalcedonians and Anti-Chalcedonians on the Reality of the Natures of Christ." *Modern Theology* 39, no. 3 (2023): 490–507. <https://doi.org/10.1111/moth.12871>.
- McCashen, Grayden. "Liberius on Athanasius at Arles, Milan, and in Constantius’ Court." *The Journal of Theological Studies* 74, no. 2 (2023): 673–705. <https://doi.org/10.1093/jts/flad034>.
- McDonald, Lee Martin. "The Emergence of Biblical Canons in Orthodox Christianity." In *The Oxford Handbook of the Bible in Orthodox Christianity*, edited by Eugen J Pentiuc, 149–63. New York: Oxford University Press, 2022. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190948658.013.12>.
- McGrath, Alister E. "Theorizing the Identity of Christ: On Early Christian Doctrinal Development." In *The Nature of Christian Doctrine: Its Origins, Development, and Function*, 29–52. Oxford: Oxford University Press, 2024. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198901440.003.0002>.
- Menze, Volker L. "The Black Swan of Chalcedon and Dioscorus’ Deposition." In *Patriarch Dioscorus of Alexandria: The Last Pharaoh and Ecclesiastical Politics in the Later Roman Empire*, 151–85. Oxford: Oxford University Press, 2023. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192871336.003.0005>.
- . "The Emperor’s Henchman: Dioscorus and the ‘Robber-Council’." In *Patriarch*

- Dioscorus of Alexandria: The Last Pharaoh and Ecclesiastical Politics in the Later Roman Empire*, 89–150. Oxford: Oxford University Press, 2023. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192871336.003.0004>.
- Niccolai, Lea. "Introduction." In *Christianity, Philosophy, and Roman Power: Constantine, Julian, and the Bishops on Exegesis and Empire*, 1–36. Cambridge: Cambridge University Press, 2023. <https://doi.org/10.1017/9781009299312.002>.
- Oliveira, Nycholas Lawrence David, and Jacobus Kok. "Codex and Contest: What an Early Christian Manuscript Reveals about Social Identity Formation Amid Persecution and Competing Christianities." *Religions* 15, no. 1 (2024): 44. <https://doi.org/10.3390/rel15010044>.
- Parvis, Sara. "The Reception of Nicaea and Homooousios to 360." In *The Cambridge Companion to the Council of Nicaea*, edited by Young Richard Kim, 225–55. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. <https://doi.org/10.1017/9781108613200.011>.
- Rukuni, Rugare, and Erna Oliver. "Nicaea as Political Orthodoxy: Imperial Christianity versus Episcopal Polities." *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 75, no. 4 (2019): a5313. <https://doi.org/10.4102/hts.v75i4.5313>.
- Sandnes, Karl Olav. "The Rule of Faith: Getting the Jigsaw Puzzle Right." *Studia Theologica - Nordic Journal of Theology* 77, no. 1 (2023): 22–39. <https://doi.org/10.1080/0039338X.2021.2019829>.
- Senior, Donald. *The New Testament: A Guide*. New York: Oxford University Press, 2022. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197530832.001.0001>.
- Slootjes, Daniëlle. "Dynamics of Power: The Nestorian Controversy, the Council of Ephesus of 431, and the Eastern Imperial Court." In *The Roman Imperial Court in the Principate and Late Antiquity*, edited by Caillan Davenport and Meaghan McEvoy, 240–61. Oxford: Oxford University Press, 2023. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192865236.003.0012>.
- Snyder, Hannah. "Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines." *Journal of Business Research* 104, no. 1 (November 2019): 333–39. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>.
- Stewart, Alistair C. "Office, and Appointment to Office, in Early Christian Circles." In *The Cambridge History of Ancient Christianity*, edited by Bruce W Longenecker and David E Wilhite, 536–58. Cambridge: Cambridge University Press, 2023. <https://doi.org/10.1017/9781108620420.029>.
- Whelan, Robin. "Count Irenaeus and the Nestorian Controversy." *The Journal of Ecclesiastical History* 76, no. 2 (2025): 245–63. <https://doi.org/10.1017/S0022046924001544>.
- Whitty, John Joseph. "Reading Basil of Caesarea's On the Holy Spirit as Apology: Reassessing the Influence of Eustathius of Sebaste on the Treatise." *Vigiliae Christianae* 77, no. 4 (2023): 353–74. <https://doi.org/10.1163/15700720-bja10056>.